



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang hasundutan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Humbang Hasundutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penyaluran;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).

Pasal 4

- (1) ADD tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 55.704.581.300 (lima puluh lima miliar tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Rincian ADD tahun anggaran 2020 untuk setiap Desa sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan dan operasional BPD; dan
 - c. kebutuhan tunjangan pejabat kepala Desa.

Pasal 5

Rincian ADD setiap Desa di Daerah untuk tahun anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran ADD dari Kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya;
 2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (4) Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan surat pertanggungjawaban.

BAB V
PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan melakukan pembayaran atas belanja pegawai paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (2) Pembayaran atas belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyaluran ADD tahap I.

- (3) Dalam hal penyaluran ADD tahap I melewati Bulan Januari tahun berjalan, pembayaran belanja pegawai yang tertunda dilakukan sekaligus pada saat ADD tahap I telah disalurkan.

BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati c.q Dinas melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I.
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap II.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya kepada Bupati c.q Dinas melalui Camat.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah belanja pegawai dan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 10

Format Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat atau tim khusus yang dapat dibentuk oleh Bupati apabila dipandang perlu.
- (4) Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD di wilayahnya.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat dibantu oleh pendamping Desa dan pendamping lokal Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 8 Maret 2020

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 10 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)	Penyaluran (Rp.)		
			Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
I	Kecamatan Parlilitan				
1.	Desa Pusuk II Simaninggir	433,498,000	173,399,200	173,399,200	86,699,600
2.	Desa Sionom Hudon VII	345,099,000	138,039,600	138,039,600	69,019,800
3.	Desa Baringin	409,232,000	163,692,800	163,692,800	81,846,400
4.	Desa Sionom Hudon Julu	387,392,000	154,956,800	154,956,800	77,478,400
5.	Desa Sionom Hudon Tonga	424,832,000	169,932,800	169,932,800	84,966,400
6.	Desa Sionom Hudon Utara	296,566,000	118,626,400	118,626,400	59,313,200
7.	Desa Sionom Hudon Selatan	449,098,000	179,639,200	179,639,200	89,819,600
8.	Desa Sionom Hudon Timur	363,125,000	145,250,000	145,250,000	72,625,000
9.	Desa Sihotang Hasugian Tonga	411,578,000	164,631,200	164,631,200	82,315,600
10.	Desa Pusuk I	433,498,000	173,399,200	173,399,200	86,699,600
11.	Desa Sionom Hudon Toruan	345,099,000	138,039,600	138,039,600	69,019,800
12.	Desa Simataniari	345,099,000	138,039,600	138,039,600	69,019,800
13.	Desa Sionom Hudon Timur II	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
14.	Desa Sihotang Hasugian Dolok II	347,525,000	139,010,000	139,010,000	69,505,000
15.	Desa Sihotang Hasugian Habinsaran	347,525,000	139,010,000	139,010,000	69,505,000
16.	Desa Sionom Hudon Sibulbulon	460,191,000	184,076,400	184,076,400	92,038,200
17.	Desa Sionom Hudon Runggu	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
18.	Desa Janji Hutanapa	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
19.	Desa Baringin Natam	420,325,000	168,130,000	168,130,000	84,065,000
20.	Desa Sihotang Hasugian Dolok I	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
II	Kecamatan Pollung				
1.	Desa Parsingguran I	345,099,000	138,039,600	138,039,600	69,019,800
2.	Desa Hutapaung	338,779,000	135,511,600	135,511,600	67,755,800
3.	Desa Pollung	336,433,000	134,573,200	134,573,200	67,286,600
4.	Desa Hutajulu	314,513,000	125,805,200	125,805,200	62,902,600
5.	Desa Ria Ria	384,965,000	153,986,000	153,986,000	76,993,000
6.	Desa Parsingguran II	449,098,000	179,639,200	179,639,200	89,819,600
7.	Desa Pansurbatu	341,206,000	136,482,400	136,482,400	68,241,200
8.	Desa Aek Nauli I	336,433,000	134,573,200	134,573,200	67,286,600
9.	Desa Aek Nauli II	336,433,000	134,573,200	134,573,200	67,286,600
10.	Desa Pandumaan	363,125,000	145,250,000	145,250,000	72,625,000
11.	Desa Sipituhuta	352,033,000	140,813,200	140,813,200	70,406,600
12.	Desa Pardomuan	323,259,000	129,303,600	129,303,600	64,651,800
13.	Desa Hutapaung Utara	387,392,000	154,956,800	154,956,800	77,478,400

No	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)	Penyaluran (Rp.)		
			Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
III	Kecamatan Baktiraja				
1.	Desa Marbun Toruan	347,525,000	139,010,000	139,010,000	69,505,000
2.	Desa Simamora	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
3.	Desa Tipang	341,206,000	136,482,400	136,482,400	68,241,200
4.	Desa Sinambela	347,525,000	139,010,000	139,010,000	69,505,000
5.	Desa Simangulampe	347,525,000	139,010,000	139,010,000	69,505,000
6.	Desa Siunong Unong Julu	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
7.	Desa Marbun Tonga Marbun Dolok	363,125,000	145,250,000	145,250,000	72,625,000
IV	Kecamatan Paranginan				
1.	Desa Sihonongan	475,791,000	190,316,400	190,316,400	95,158,200
2.	Desa Paranginan Selatan	376,299,000	150,519,600	150,519,600	75,259,800
3.	Desa Paranginan Utara	475,791,000	190,316,400	190,316,400	95,158,200
4.	Desa Lumban Sialaman	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
5.	Desa Pearung	338,779,000	135,511,600	135,511,600	67,755,800
6.	Desa Lobutolong	435,925,000	174,370,000	174,370,000	87,185,000
7.	Desa Lumban Barat	451,525,000	180,610,000	180,610,000	90,305,000
8.	Desa Siboru Torop	387,312,000	154,924,800	154,924,800	77,462,400
9.	Desa Pearung Silali	460,191,000	184,076,400	184,076,400	92,038,200
10.	Desa Lumban Sianturi	347,525,000	139,010,000	139,010,000	69,505,000
11.	Desa Lobutolong Habinsaran	396,058,000	158,423,200	158,423,200	79,211,600
V	Kecamatan Lintongnihuta				
1.	Desa Sibuntuon Partur	389,739,000	155,895,600	155,895,600	77,947,800
2.	Desa Siharjulu	438,272,000	175,308,800	175,308,800	87,654,400
3.	Desa Sitolu Bahal	389,739,000	155,895,600	155,895,600	77,947,800
4.	Desa Tapan Nauli	354,379,000	141,751,600	141,751,600	70,875,800
5.	Desa Pargaulan	314,513,000	125,805,200	125,805,200	62,902,600
6.	Desa Lobutua	323,179,000	129,271,600	129,271,600	64,635,800
7.	Desa Dolok Margu	389,739,000	155,895,600	155,895,600	77,947,800
8.	Desa Hutasoit I	411,578,000	164,631,200	164,631,200	82,315,600
9.	Desa Nagasaribu I	389,739,000	155,895,600	155,895,600	77,947,800
10.	Desa Nagasaribu II	336,433,000	134,573,200	134,573,200	67,286,600
11.	Desa Sibuntoan Parpea	387,392,000	154,956,800	154,956,800	77,478,400
12.	Desa Siponjot	330,113,000	132,045,200	132,045,200	66,022,600
13.	Desa Habeahan	347,525,000	139,010,000	139,010,000	69,505,000
14.	Desa Sigompul	411,658,000	164,663,200	164,663,200	82,331,600
15.	Desa Bonan Dolok	411,658,000	164,663,200	164,663,200	82,331,600
16.	Desa Sigumpar	363,125,000	145,250,000	145,250,000	72,625,000
17.	Desa Parulohan	435,925,000	174,370,000	174,370,000	87,185,000
18.	Desa Sitio II	411,658,000	164,663,200	164,663,200	82,331,600
19.	Desa Hutasoit II	411,658,000	164,663,200	164,663,200	82,331,600
20.	Desa Nagasaribu III	427,258,000	170,903,200	170,903,200	85,451,600
21.	Desa Nagasaribu IV	444,591,000	177,836,400	177,836,400	88,918,200
22.	Desa Nagasaribu V	363,125,300	145,250,120	145,250,120	72,625,060
VI	Kecamatan Doloksanggul				
1.	Desa Sileang	360,699,000	144,279,600	144,279,600	72,139,800
2.	Desa Purba Manalu	387,392,000	154,956,800	154,956,800	77,478,400
3.	Desa Pasaribu	435,925,000	174,370,000	174,370,000	87,185,000
4.	Desa Simarigung	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
5.	Desa Sampean	296,566,000	118,626,400	118,626,400	59,313,200
6.	Desa Silaga Laga	298,913,000	119,565,200	119,565,200	59,782,600
7.	Desa Sosor Gonting	363,126,000	145,250,400	145,250,400	72,625,200
8.	Desa Sosor Tambok	323,259,000	129,303,600	129,303,600	64,651,800
9.	Desa Purba Dolok	378,726,000	151,490,400	151,490,400	75,745,200
10.	Desa Sihite I	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
11.	Desa Lumban Tobing	290,246,000	116,098,400	116,098,400	58,049,200
12.	Desa Hutabagasan	336,433,000	134,573,200	134,573,200	67,286,600
13.	Desa Matiti II	314,513,000	125,805,200	125,805,200	62,902,600
14.	Desa Saitnihuta	381,072,000	152,428,800	152,428,800	76,214,400
15.	Desa Hutaraja	341,206,000	136,482,400	136,482,400	68,241,200

No	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)	Penyaluran (Rp.)		
			Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
16.	Desa Lumban Purba	298,913,000	119,565,200	119,565,200	59,782,600
17.	Desa Bonanionan	363,126,000	145,250,400	145,250,400	72,625,200
18.	Desa Parik Sinomba	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
19.	Desa Sihite II	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
20.	Desa Janji	296,566,000	118,626,400	118,626,400	59,313,200
21.	Desa Pakkat	336,433,000	134,573,200	134,573,200	67,286,600
22.	Desa Sirisirisi	352,033,000	140,813,200	140,813,200	70,406,600
23.	Desa Hutagurgur	365,472,000	146,188,800	146,188,800	73,094,400
24.	Desa Matiti	336,433,000	134,573,200	134,573,200	67,286,600
25.	Desa Aek Lung	323,179,000	129,271,600	129,271,600	64,635,800
26.	Desa Simangaronsang	402,992,000	161,196,800	161,196,800	80,598,400
27.	Desa Sosortolong Sihite III	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
VII Kecamatan Sijamapolang					
1.	Desa Batunajagar	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
2.	Desa Sanggaran I	323,259,000	129,303,600	129,303,600	64,651,800
3.	Desa Sitapongan	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
4.	Desa Sigulok	296,566,000	118,626,400	118,626,400	59,313,200
5.	Desa Hutaginjang	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
6.	Desa Siborboron	345,099,000	138,039,600	138,039,600	69,019,800
7.	Desa Bonan Dolok I	323,179,000	129,271,600	129,271,600	64,635,800
8.	Desa Bonan Dolok II	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
9.	Desa Sibuntuon	349,872,000	139,948,800	139,948,800	69,974,400
10.	Desa Nagurguran	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
VIII Kecamatan Onanganjang					
1.	Desa Batu Nagodang Siatas	274,646,000	109,858,400	109,858,400	54,929,200
2.	Desa Onan Ganjang	387,392,000	154,956,800	154,956,800	77,478,400
3.	Desa Parbotihan	376,299,000	150,519,600	150,519,600	75,259,800
4.	Desa Sihikit	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
5.	Desa Parnapa	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
6.	Desa Janji Nagodang	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
7.	Desa Sampe Tua	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
8.	Desa Hutajulu	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
9.	Desa Sibuluan	298,913,000	119,565,200	119,565,200	59,782,600
10.	Desa Sigalogo	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
11.	Desa Aek Godang Arbaan	323,259,000	129,303,600	129,303,600	64,651,800
12.	Desa Sanggaran II	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
IX Kecamatan Pakkat					
1.	Desa Purba Bersatu	369,365,000	147,746,000	147,746,000	73,873,000
2.	Desa Purba Baringin	349,872,000	139,948,800	139,948,800	69,974,400
3.	Desa Karya	363,126,000	145,250,400	145,250,400	72,625,200
4.	Desa Manalu	398,405,000	159,362,000	159,362,000	79,681,000
5.	Desa Sijarango	371,712,000	148,684,800	148,684,800	74,342,400
6.	Desa Tukka Dolok	338,779,000	135,511,600	135,511,600	67,755,800
7.	Desa Siambaton	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
8.	Desa Parmonangan	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
9.	Desa Sipagabu	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
10.	Desa Banuarea	396,058,000	158,423,200	158,423,200	79,211,600
11.	Desa Rura Tanjung	387,392,000	154,956,800	154,956,800	77,478,400
12.	Desa Rura Aek Sopang	349,872,000	139,948,800	139,948,800	69,974,400
13.	Desa Lumban Tonga-Tonga	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
14.	Desa Pulo Godang	320,833,000	128,333,200	128,333,200	64,166,600
15.	Desa Pakkat Hauagong	451,525,000	180,610,000	180,610,000	90,305,000
16.	Desa Peadungdung	396,058,000	158,423,200	158,423,200	79,211,600
17.	Desa Sijarango I	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
18.	Desa Ambobi Paranginan	396,058,000	158,423,200	158,423,200	79,211,600
19.	Desa Purba Sianjur	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
20.	Desa Siambaton Pahae	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
21.	Desa Panggugunan	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
22.	Desa Hauagong	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200

No	Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa (Rp)	Penyaluran (Rp.)		
			Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
X	Kecamatan Tarabintang				
1.	Desa Tarabintang	422,672,000	169,068,800	169,068,800	84,534,400
2.	Desa Sihotang Hasugian Toruan	323,179,000	129,271,600	129,271,600	64,635,800
3.	Desa Sibongkare	349,872,000	139,948,800	139,948,800	69,974,400
4.	Desa Sitanduk	369,365,000	147,746,000	147,746,000	73,873,000
5.	Desa Sihombu	363,046,000	145,218,400	145,218,400	72,609,200
6.	Desa Simbara	347,526,000	139,010,400	139,010,400	69,505,200
7.	Desa Marpadan	420,325,000	168,130,000	168,130,000	84,065,000
8.	Desa Mungkur	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400
9.	Desa Sibongkare Sianju	371,792,000	148,716,800	148,716,800	74,358,400

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Penerimaan Pembiayaan											
3.1.1	SiLPA											
3.2	Pengeluaran Pembiayaan											
3.2.1	Penyertaan Modal											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

KAUR KEUANGAN,

(.....)

(Desa), (Tanggal,Bulan,Tahun)
Disetujui Oleh :
KEPALA DESA.....,
(.....)

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001